

1. Daftar Informasi Publik

No	Daftar Informasi Publik
1	Informasi Profil Dinas
2	Dokumen Rencana Strategis
3	Dokumen Rencana Kerja Tahunan
4	Daftar Nama dan Nilai Paket Pekerjaan, Pelaksana/Penyedia Jasa/Konsultan, dan Masa Pelaksanaan Pekerjaan
5	Informasi Terkait Regulasi dan Layanan meliputi Daftar Peraturan, Prosedur Operasional Standar (SOP), dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
6	Informasi Tata Ruang meliputi Muatan pelayanan Informasi Tata Ruang antara lain: - Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. - Rencana struktur ruang. - Rencana Pola Ruang. - Penetapan kawasan strategis. - Arah pemanfaatan ruang. - Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. - Hak, kewajiban dan peran Masyarakat.
7	Informasi Geospasial Dasar meliputi Muatan pelayanan Informasi Geospasial Dasar antara lain: - Peta garis Pantai. - Peta Hipsografis (kontur dan ketinggian). - Peta perairan. - Peta nama rupabumi. - Peta wilayah administrasi. - Peta transportasi dan utilitas. - Peta bangunan dan fasilitas umum. - Peta penutup lahan.
8	Data Sumber Daya Air meliputi Data Hidrologi, Data Jaringan Irigasi, Data Tampung Air

2. Daftar Informasi Dikecualikan

No	Daftar Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
1	Dokumen pengadaan barang/jasa milik pihak ke 2 (dokumen penawaran) Meliputi: - Surat penawaran - Gambar produk yang ditawarkan - Jadwal pelaksanaan - SIUP penyedia - TDP / NID penyedia - Pengalaman penyedia - Rancangan kontrak - Data kualifikasi penyedia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b - UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4 - Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 - Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

3	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses / sedang berjalan termasuk : dokumen pengawasan dan dokumen perencanaan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 6 angka 3 huruf e tentang informasi publik yang diminta belum dikuasai / belum didokumentasikan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021)
4	Rincian harga satuan pada perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf i dan j - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4
5	Biodata elektronik (data base) PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - UU No. 11 Tahun 2018 tentang ITE Pasal 25-37 - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6	Hasil tes kompetensi PCAP Pejabat Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h
7	Penilaian kinerja/ prestasi kerja pegawai	PP No. 14 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS
8	Arsip Ijazah (softcopy)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j - UU No. 23 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h
9	Ijin perceraian PNS	UU No. 8 Tahun 1974 tentang Perkawinan
10	Hukuman disiplin pegawai	PP No. 56 tentang Hukuman Disiplin Pegawai
11	Rahasia jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf e
12	Usulan formasi kebutuhan pegawai Pemerintahan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
13	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ keuangan kegiatan dan perjalanan dinas yang belum diaudit oleh BPK (tahun berjalan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i
14	Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan BPK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No. 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Peraturan BPK RI No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
15	Laporan keuangan yang belum diaudit	Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015
16	Data user dan password server / aplikasi / perangkat TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17
17	Memorandum Internal	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i
18	Detail Teknis Kritis Infrastruktur	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c
19	Hasil pemeriksaan kesehatan (riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan fisik dan Kesehatan seseorang)	- UU No. 39 Tahun 2000 tentang HAM - PP No. 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia - UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 tentang Kesehatan

Kepala,

